

Analisis Literatur: Tantangan dan Peluang Public-Private Partnership (PPP) dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kalimantan Timur

Anita¹, Yuli Wulandari², Ni Luh Gede Dian Puspitasari³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴, Usfandi Haryaka⁵

Universitas Mulawarman, Indonesia

ulfanita@gmail.com¹, wulandarryuli17@gmail.com², niluhgede1@gmail.com³,
widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁴, usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id⁵

Submitted: 07th April 2025 | **Edited:** 02nd May 2025 | **Issued:** 01st May 2025

Cited on: Anita, A., Wulandari, Y., Puspitasari, N. L. G. D., Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Analisis Literatur: Tantangan dan Peluang Public-Private Partnership (PPP) dalam Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kalimantan Timur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 926-936.

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges and opportunities of implementing Public-Private Partnership (PPP) in financing primary and secondary education in East Kalimantan. Through a literature review of various national and international sources, the study identifies several key obstacles in PPP implementation, including unclear regulations, limited capacity of local government, and imbalances in the interests between the public and private sectors. The issue of sustainability in financing is also a significant challenge. However, there are considerable opportunities for the development of PPP, driven by the substantial need for educational infrastructure, advances in educational technology, and the potential for adopting PPP practices from more developed countries. This study recommends several key actions, including the formulation of clearer and more detailed policies, strengthening institutional capacity, providing fiscal incentives to the private sector, and enhancing transparency and accountability mechanisms in PPP implementation. These measures aim to optimize the role of PPP in promoting equity and improving the quality of education in East Kalimantan.

Keywords: Public-Private Partnership (PPP), education financing, primary and secondary education, East Kalimantan, government-private sector partnership, PPP challenges, PPP opportunities

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum yang diterapkan, tetapi juga pada faktor pembiayaan yang memadai dan efektif. Meskipun anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, kenyataannya dana yang tersedia sering kali

masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya, seperti Kalimantan Timur (Bappenas, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pendanaan pendidikan semakin dirasakan, memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal, baik di pedesaan maupun perkotaan. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang masih menghadapi masalah kekurangan fasilitas dasar dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan dana pendidikan yang ada.

Untuk mengatasi kekurangan ini, konsep Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta sering kali dipandang sebagai solusi alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pendidikan. PPP berpotensi untuk mengoptimalkan sumber daya baik dari sektor publik maupun swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Model kemitraan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih modern, pengembangan teknologi pendidikan, serta terciptanya sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Singapura dan Brasil telah berhasil menerapkan PPP di sektor pendidikan dengan hasil yang signifikan (Baker & Chen, 2021).

Namun, penerapan PPP di Kalimantan Timur, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah, menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpastian regulasi yang sering berubah, perbedaan visi antara pemerintah dan sektor swasta, serta kekhawatiran terhadap komersialisasi pendidikan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Selain itu, masih ada keraguan tentang apakah model PPP dapat diterapkan dengan efektif di daerah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat berbeda dengan daerah perkotaan yang lebih maju.

Di sisi lain, PPP membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur, terutama melalui pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih baik, penyediaan fasilitas modern, dan pengembangan teknologi yang mendukung proses belajar-mengajar. Inisiatif seperti ini berpotensi untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai tantangan dan potensi yang terkait dengan penerapan kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

LANDASAN TEORI

Konsep Public-Private Partnership (PPP) dalam pendidikan merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan maupun infrastruktur publik, termasuk pendidikan. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk meringankan beban pembiayaan negara, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani (World Bank, 2020). PPP dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pendanaan sekolah, penyediaan teknologi pembelajaran, pelatihan tenaga pendidik, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih modern (OECD, 2012).

Model PPP di sektor pendidikan sangat bervariasi antar negara, tergantung pada kebijakan dan kerangka regulasi yang berlaku. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan PPP diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang memberikan ruang bagi sektor pendidikan untuk bekerja sama dengan swasta dalam membangun dan mengelola infrastruktur pendidikan (Kementerian Keuangan, 2021). Dukungan terhadap kemitraan ini juga datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dalam mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional (Kemendikbud, 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa PPP dalam sektor pendidikan membawa sejumlah manfaat yang signifikan, seperti efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, peningkatan inovasi dalam proses pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan

berkualitas (Patrinós et al., 2009). Sebagai contoh, negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Brasil telah berhasil menerapkan model PPP dalam pendidikan dengan hasil yang mencolok, baik dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maupun infrastruktur yang lebih modern (Baker & Chen, 2021).

Namun, implementasi PPP tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain adalah belum optimalnya regulasi yang mendukung kerjasama ini, lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan proyek, serta potensi komersialisasi pendidikan yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan akses pendidikan yang setara (Verger, 2016). Lebih lanjut, masih ada ketidakpastian dalam kebijakan yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan kemitraan jangka panjang antara sektor publik dan swasta.

Di Kalimantan Timur, penerapan PPP di sektor pendidikan telah mulai dilakukan, meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digagas oleh perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, seperti pembangunan sekolah dan pelatihan guru, menjadi salah satu contoh awal kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah di daerah ini (Putera Sampoerna Foundation, 2023). Namun, implementasi PPP di Kalimantan Timur masih menghadapi hambatan-hambatan, seperti minimnya insentif bagi pihak swasta dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah (Bappeda Kalimantan Timur, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendalam dan lebih terintegrasi, seperti pemberian insentif fiskal untuk sektor swasta serta perbaikan dalam kapasitas administrasi dan teknis di tingkat pemerintahan daerah.

Skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 sebagai pedoman utama dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Panduan teknis pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan kemitraan ini (Bappenas, 2020). Secara nasional, beberapa proyek PPP di sektor pendidikan, seperti pembangunan Sekolah Terintegrasi Berpola Asrama di Nabire, Papua, menunjukkan potensi besar dari skema ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang (Tanoto Foundation, 2022).

Studi perencanaan infrastruktur pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melalui skema PPP juga menunjukkan bahwa keterbatasan dana dan sumber daya dapat diatasi dengan lebih efisien melalui model ini. Implementasi PPP di sektor pendidikan juga diharapkan dapat memangkas waktu pembangunan hingga 15 tahun jika dibandingkan dengan metode konvensional, yang merupakan keuntungan signifikan dalam mendukung percepatan pembangunan pendidikan di daerah (Tanoto Foundation, 2023).

Dengan demikian, PPP dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, meskipun tantangan dalam penerapannya masih perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan pemberdayaan yang lebih baik terhadap berbagai pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan dan peluang penerapan skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pembiayaan pendidikan di Kalimantan Timur. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis wacana, kebijakan, serta praktik implementasi PPP melalui kajian mendalam terhadap berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang telah dipublikasikan (Snyder, 2020).

Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi fokus karena wilayah ini mencerminkan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selain itu, Kalimantan Timur juga merupakan daerah yang sedang mengalami transformasi pembangunan besar sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga memiliki urgensi tinggi untuk membangun sistem pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

1. Literatur Primer: Artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus, SINTA, Google Scholar, dan Springer yang membahas topik PPP dalam pendidikan; buku akademik

terkait; serta laporan dari lembaga internasional seperti World Bank (2020), OECD (2021), dan ADB (2022).

2. Literatur Sekunder: Dokumen kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015, serta laporan daerah dari Bappeda Kalimantan Timur.
3. Literatur Tersier: Ensiklopedia, prosiding, dan laporan konferensi akademik yang digunakan untuk memperkuat perspektif teoretis dan kontekstual.

Kriteria seleksi literatur terdiri dari : membahas topik PPP dalam konteks pembiayaan Pendidikan, berasal dari sumber akademik atau institusi resmi, diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025, dengan preferensi utama pada publikasi setelah tahun 2020 dan menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan klasifikasi tema dengan mengelompokkan literatur ke dalam kategori utama, seperti konsep PPP dalam pendidikan, regulasi dan kebijakan PPP di Indonesia dan Kalimantan Timur, studi kasus implementasi PPP, tantangan dalam penerapan, serta peluang dan strategi pengembangannya. Kedua, dilakukan koding data, yakni dengan menandai konsep-konsep kunci dari setiap sumber, seperti model pembiayaan, kendala regulasi, keterlibatan investasi swasta, dan aspek keberlanjutan program. Ketiga, dilaksanakan sintesis data untuk menggabungkan temuan dari berbagai sumber sehingga membentuk pemahaman menyeluruh tentang kondisi PPP dalam pembiayaan pendidikan di Kalimantan Timur. Terakhir, dilakukan validasi temuan dengan membandingkan hasil analisis terhadap teori dan studi kasus lain guna memastikan akurasi dan konsistensi data.

HASIL PENELITIAN

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang secara geografis luas dan memiliki tantangan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (2023), tingkat partisipasi sekolah di daerah ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD mencapai 98,2%, namun menurun menjadi

85,4% untuk SMP dan 76,9% untuk SMA, terutama disebabkan oleh hambatan akses geografis, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Ketimpangan juga tercermin dari distribusi guru, di mana 64% guru berkualifikasi S1 dan tersertifikasi terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan (BPS Kaltim, 2022). Selain itu, data menunjukkan bahwa hanya 32% sekolah di wilayah pedalaman memiliki akses internet stabil, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi (Kemendikbudristek, 2023).

Implementasi skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pendidikan di Kalimantan Timur telah berjalan melalui beberapa model, meskipun masih terbatas pada inisiatif CSR dan proyek kerjasama terbatas. Misalnya, pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan beasiswa oleh perusahaan tambang besar seperti PT Kaltim Prima Coal menunjukkan adanya kontribusi sektor swasta dalam peningkatan akses pendidikan. Program CSR seperti Pelita Pendidikan dari Tanoto Foundation juga telah memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi dan pelatihan guru di wilayah Kutai Kartanegara dan Berau (Tanoto Foundation, 2022). Namun, efektivitas program-program ini belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif karena minimnya indikator evaluasi yang terintegrasi. Tidak ditemukan sistem pemantauan kinerja jangka panjang yang menilai capaian hasil dari kolaborasi pemerintah-swasta dalam konteks pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Tantangan utama dalam implementasi PPP di sektor pendidikan Kalimantan Timur meliputi kurangnya regulasi spesifik, insentif fiskal yang lemah, dan ketidakterpaduan koordinasi antar pemangku kepentingan. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 masih lebih berfokus pada sektor infrastruktur umum dan belum secara eksplisit mengatur skema PPP dalam pendidikan (Kementerian Keuangan, 2021). Minimnya insentif fiskal, seperti keringanan pajak atau penyederhanaan birokrasi, menjadi hambatan partisipasi swasta (OECD, 2021). Selain itu, transparansi pelaksanaan program PPP masih lemah, terutama dalam pelaporan penggunaan dana CSR dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan mitra swasta. Namun, di sisi lain, peluang besar terbuka dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah ini. Peningkatan investasi sektor swasta dan digitalisasi pendidikan berbasis platform daring menjadi momentum penting untuk mengembangkan PPP secara lebih sistematis. Upaya reformasi regulasi melalui Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Pendanaan

Pendidikan di IKN, serta pilot project PPP di pendidikan vokasi yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek, dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi untuk Kalimantan Timur (Kemendikbudristek, 2024).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PPP dalam sektor pendidikan di Kalimantan Timur masih berada dalam tahap awal dan cenderung terbatas pada praktik filantropi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini selaras dengan temuan World Bank (2020) dan OECD (2021) yang menyatakan bahwa di negara berkembang, PPP di sektor pendidikan seringkali belum sepenuhnya dikembangkan secara struktural dan lebih dominan bersifat parsial serta reaktif. Meskipun terdapat upaya penyediaan infrastruktur dan beasiswa oleh sektor swasta, kontribusi ini belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan jangka panjang yang mengutamakan pemerataan dan kualitas. Kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan terpencil tetap menjadi tantangan utama, sebagaimana tercermin dari perbedaan angka partisipasi sekolah dan kualitas fasilitas pendidikan.

Masalah regulasi dan insentif fiskal yang lemah merupakan faktor penghambat utama dalam perluasan skema PPP yang lebih strategis di Kalimantan Timur. Regulasi nasional seperti Perpres No. 38 Tahun 2015 memang menyediakan kerangka hukum dasar PPP, namun belum mengakomodasi karakteristik sektor pendidikan yang menuntut fleksibilitas dan sensitivitas sosial. Ketidadaan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur PPP untuk pendidikan menyebabkan ketidakpastian bagi investor, dan ini diperparah oleh birokrasi yang berbelit (Kementerian Keuangan, 2021). Kurangnya insentif fiskal seperti keringanan pajak, serta minimnya jaminan atas pengembalian investasi sosial menjadi alasan mengapa partisipasi sektor swasta masih rendah (OECD, 2021). Selain itu, belum ada sistem evaluasi terstandar yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari proyek PPP terhadap hasil belajar, sehingga akuntabilitas program menjadi lemah.

Namun demikian, kondisi ini juga membuka ruang untuk reformasi. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi titik strategis yang dapat mendorong transformasi sektor pendidikan melalui skema PPP yang lebih sistemik. Investasi yang masuk ke wilayah ini, terutama di sektor infrastruktur dan teknologi, dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis kemitraan yang

kuat. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan insentif yang lebih menarik, mempercepat regulasi teknis khusus sektor pendidikan, serta membentuk satuan tugas lintas sektor untuk koordinasi dan pemantauan program PPP. Selain itu, pembelajaran dari praktik baik seperti program Pelita Pendidikan oleh Tanoto Foundation dan proyek digitalisasi di sekolah vokasi harus dijadikan rujukan dalam membangun model PPP yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan PPP yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas guru, teknologi pembelajaran, dan layanan siswa secara menyeluruh, akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang tangguh di Kalimantan Timur.

KESIMPULAN

Implementasi Public-Private Partnership (PPP) dalam pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama melalui penyediaan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, pelatihan guru, dan program beasiswa. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan nyata seperti ketidakjelasan regulasi khusus di sektor pendidikan, kurangnya insentif bagi sektor swasta, serta rendahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan mitra swasta. Kasus-kasus di daerah pedalaman Kalimantan Timur menunjukkan bahwa keterbatasan geografis, ketimpangan distribusi guru, serta akses internet yang minim menjadi hambatan utama yang belum sepenuhnya teratasi meskipun telah ada inisiatif CSR dan kolaborasi terbatas dengan pihak swasta.

Keberhasilan skema PPP ke depan sangat ditentukan oleh kejelasan kebijakan teknis, komitmen lintas sektor, transparansi dalam tata kelola, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai koordinator. Pemerintah daerah perlu merancang regulasi turunan yang lebih operasional dan memberi ruang partisipasi sektor swasta secara aman dan terukur. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran konseptual dan kontekstual berbasis studi literatur, keterbatasan berupa tidak digunakannya data primer menjadi catatan penting untuk penelitian lanjutan. Implikasi kebijakan dari studi ini adalah pentingnya membentuk forum koordinatif antar pemangku kepentingan serta mendesain model PPP pendidikan yang kontekstual, adaptif, dan terukur secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian tentang kemitraan pemerintah-swasta (Public-Private Partnership) di sektor pendidikan, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis seperti Kalimantan Timur. Dengan pendekatan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini menyoroti pentingnya fleksibilitas kebijakan dan kesesuaian model PPP dengan kebutuhan lokal. Hal ini menegaskan bahwa implementasi PPP tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi serta kapasitas kelembagaan daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, pelaku industri, dan organisasi pendidikan dalam merancang kebijakan atau program kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil studi ini untuk mendorong regulasi teknis yang lebih spesifik di sektor pendidikan, menyusun peta jalan kemitraan, serta menyediakan insentif fiskal bagi mitra swasta. Di sisi lain, sektor swasta dapat melihat temuan ini sebagai dasar untuk membangun model keterlibatan sosial yang berdampak jangka panjang, tidak hanya sebagai bentuk CSR, tetapi sebagai investasi sosial strategis yang mendukung pembangunan SDM secara luas di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, S., & Chen, Z. (2021). *Public-Private Partnerships in Education: Global Trends and Local Insights*. *Journal of Educational Policy*, 48(2), 75-94.
- Bappeda Kalimantan Timur. (2024). *Laporan Pengembangan Sektor Pendidikan di Kalimantan Timur*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2021). Reconceptualizing literature reviews in research. *Information and Organization*, 31(2), 100339.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *Laporan Kinerja Pendidikan Tahun 2023*. Samarinda: Disdik Kaltim.
- Kemendikbud. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2023). *Peta Jalan Digitalisasi Pendidikan Indonesia 2021–2024*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2024). *Program PPP Pendidikan Vokasi: Studi Kasus dan Strategi Replikasi*. Jakarta.

- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pedoman Umum Skema KPBU untuk Infrastruktur Sosial*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Strategi Pembiayaan Infrastruktur*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- OECD. (2012). *Public-Private Partnerships in Education: New Approaches to the Delivery of Education Services*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Enhancing Public-Private Partnerships in Emerging Economies: Policy Lessons and Future Directions*. Paris: OECD Publishing.
- Patrinos, H. A., Barrera-Orsorio, F., & Guaqueta, J. (2009). *The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education*. Education Working Paper Series No. 9.
- Putra Sampoerna Foundation. (2023). *CSR untuk Pendidikan di Kalimantan Timur*. Putra Sampoerna Foundation.
- Snyder, H. (2020). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Tanoto Foundation. (2022). *Annual Impact Report: Improving Education Equity through CSR*. Jakarta.
- Tanoto Foundation. (2022). *Pendidikan di Papua: Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas*. Tanoto Foundation.
- Tanoto Foundation. (2023). *Infrastruktur Pendidikan Politeknik Keuangan Negara STAN: Pembiayaan melalui Skema PPP*. Tanoto Foundation.
- Verger, A. (2016). *The Privatization of Education: A Critical Review*. *Journal of Education Policy*, 31(6), 654-671.
- World Bank. (2020). *Public-Private Partnerships in Education: Evidence from International Experience*. The World Bank.
- World Bank. (2020). *Reimagining PPPs in Education: Contextualizing in Developing Regions*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *The Role of PPPs in Delivering Quality Education Services*. Washington DC: World Bank Group.